

**SKRIPSI**

**URGENSI PENGADOPSIAN *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS* DALAM HUKUM INDONESIA  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA  
SEKTOR BISNIS**

**OLEH**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**URGENSI PENGADOPSIAN UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES  
ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DALAM HUKUM INDONESIA  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA  
SEKTOR BISNIS**

**ROMA ALIYAFI, 1210113143, HUKUM INTERNASIONAL, FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 2018**

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia harus dilindungi dari pelanggaran oleh semua pihak, termasuk korporasi. *United Nation Guiding Principles on Business and Humanright* merupakan instrumen *soft law* hukum internasional sebagai salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di sektor bisnis. sifat *soft law* dari instrumen ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*nonlegally binding*) sehingga dalam implementasi hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Agar instrumen ini efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally binding*), instrumen ini memerlukan pengadopsian kedalam sistem hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan Negara penerima investasi (*host country*), Indonesia rentan terjadi pelanggaran HAM di sektor bisnis, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang berhubungan dengan operasional bisnis. untuk itu Indonesia sangat berkepentingan untuk mengadopsi instrumen ini ke dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi legislasi pengadopsian instrumen ini dapat dimasukkan kedalam produk hukum nasional baik itu dari level Undang-Undang sampai peraturan daerah, sehingga perlindungan Negara terhadap pelanggaran HAM berjalan efektif.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, korporasi, bisnis, soft law

**ADOPTION URGENCY UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON  
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA'S LAW AS HUMAN  
RIGHTS PROTECTION EFFORT ON THE BUSINESS SECTOR**

**ROMA ALIYAFI, 1210113143, INTERNATIONAL LAW, FACULTY OF  
LAW ANDALAS UNIVERSITY, 2018**

**ABSTRACT**

Human rights must be protected against violations by all parties, including corporations. The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights is a soft law instrument of international law as an effort to protect human rights in the business sector. the soft law nature of this instrument has no binding legal force so that in implementation it is only voluntary. In order for this instrument to be effective and legally binding, this instrument requires adoption into the national legal system. This research is a type of normative legal research using literature research approach. The data used in this research is secondary data. The use of secondary data is done by library study then analyzed qualitatively. Indonesia as a developing country with abundant natural resources and host country, Indonesia is vulnerable to human rights violations in the business sector, this can be seen from several cases of human rights violations related to business operations. for that Indonesia is very interested to adopt this instrument into the legal system of Indonesia. Harmonization of the legislation to adopt this instrument can be incorporated into the national legal product either from the level of the law to the local regulations, so that the State's protection against human rights violations is effective.

Keywords: Human Rights, corporation, business, soft law

